

ANALISIS FAKTOR PENENTU KEBERLANJUTAN DAN STRATEGI PEMANFAATAN LAHAN DI LOKAPURNA TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK

(Determinant Factor Analysis of Sustainability And Land Use Strategy In Lokapurna Mount Halimun Salak National Park)

BAYU GAGAT PRASASTI¹⁾, SAMBAS BASUNI²⁾ DAN TUTUT SUNARMINTO³⁾

¹⁾Mahasiswa Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

^{2,3)} Dosen Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB
Email: bayu.abdipraja@gmail.com

Diterima 01 November 2016 / Disetujui 13 Maret 2017

ABSTRACT

Lokasi Purnawirawan (Lokapurna) is an area located in the Mount Halimun Salak National Park (TNGHS). Lokapurna is an expansion area of TNGHS through Minister of Forestry Decree No. 175 in 2003. Expansion in TNGHS caused the loss of community access to utilize the land in national park area and it caused a conflict between community and TNGHS. The determinant factor of land use sustainability in Lokapurna is important to reduce land tenure conflicts between the community and TNGHS. The conflict occur because of misperception between community and TNGHS. Moreover, the determinant factors of land use sustainability were needed to know to determine land use policy strategy in Lokapurna. This study aimed to analyze the determinant factors of land use sustainability in Lokapurna and to contrive the alternative strategies for land use in Lokapurna. This research method using qualitative methods. The selection of respondents were conducted by purposive sampling with consideration of respondents who are involved directly or deemed to have the ability and understanding regarding land use in Lokapurna. The research data was obtained through closed ended questionnaire. This data was analyzed by analytic hierarchy process (AHP) method and processed using software Expert Choice 2000. The result shown that the highest determinant factor of land use sustainability in Lokapurna is environmental factors (0,472) followed by social factors (0,301) and economic factors (0,272). Moreover, the first priority of alternative land use strategy is collaborative ecotourism development (0,494), the second priority is the optimization of specific zone (0,378) and the last priority is community relocation (0,124).

Keywords: land use, Lokapurna, Mount Halimun Salak National Park, priority, strategy

ABSTRAK

Lokasi Purnawirawan (Lokapurna) merupakan kawasan yang masuk dalam Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Lokapurna merupakan kawasan perluasan TNGHS melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175 Tahun 2003. Perluasan TNGHS menyebabkan hilangnya akses masyarakat untuk menggarap lahan di dalam kawasan taman nasional dan hal ini mengakibatkan terjadinya konflik antara masyarakat dan TNGHS. Konflik terjadi akibat adanya perbedaan persepsi antara masyarakat dengan pihak TNGHS saat perluasan TNGHS. Faktor penentu keberlanjutan pemanfaatan lahan Lokapurna penting diketahui untuk menguraikan konflik pemanfaatan lahan yang terjadi di Lokapurna antara masyarakat dengan TNGHS. Faktor penentu keberlanjutan pemanfaatan lahan juga perlu diketahui untuk menentukan strategi kebijakan pemanfaatan lahan di Lokapurna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penentu keberlanjutan pemanfaatan lahan Lokapurna dan merumuskan alternatif strategi bagi pemanfaatan lahan Lokapurna. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pemilihan responden dalam penelitian dilakukan berdasarkan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan responden yang terlibat langsung atau dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti mengenai pemanfaatan lahan di Lokapurna. Data penelitian didapatkan melalui penyebaran kuisioner pola tertutup. Analisis penelitian ini menggunakan metode analisis hierarki proses (AHP) dan data diolah menggunakan bantuan software Expert Choice 2000. Hasil analisis digunakan sebagai dasar untuk menentukan alternatif strategi bagi pemanfaatan lahan di Lokapurna. Hasil perhitungan diketahui bahwa faktor penentu keberlanjutan pemanfaatan lahan Lokapurna yang tertinggi yaitu faktor lingkungan (0,427) diikuti faktor sosial (0,301) dan faktor ekonomi (0,272). Alternatif strategi pemanfaatan lahan yang menjadi prioritas pertama yaitu pengembangan wisata secara kolaboratif (0,494). Prioritas kedua yang menjadi alternatif strategi pemanfaatan lahan yaitu optimalisasi zona khusus (0,378). Relokasi masyarakat merupakan prioritas terakhir dalam alternatif strategi pemanfaatan lahan Lokapurna (0,124).

Kata kunci: Lokapurna, pemanfaatan lahan, prioritas, strategi, Taman Nasional Gunung Halimun Salak

PENDAHULUAN

Taman nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang luas, relatif tidak terganggu, mempunyai nilai alam yang menonjol dengan kepentingan pelestarian tinggi, potensi objek rekreasi yang besar, mudah dicapai dan mempunyai manfaat yang jelas bagi wilayah tersebut (McKinnon *et al.* 1990). Keberadaan taman nasional menurut IUCN (1994) ditunjuk untuk melindungi integritas ekologi satu atau lebih untuk kepentingan generasi kini dan yang akan datang,

melarang eksploitasi dan okupasi yang bertentangan dengan tujuan penunjukannya, memberikan landasan untuk pengembangan spiritual, ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi dan kesempatan bagi pengunjung yang ramah secara ekologi dan budaya. Penetapan Taman Nasional dianggap Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan sebagai salah satu solusi yang mendekati isu konservasi menuju hutan lestari. Sejak penetapan pertama tahun 1980 terhadap status Taman Nasional lima kawasan, yakni: TN Gunung Leuser; TN

Ujung Kulon, TN Baluran, TN Komodo dan TN Gede Pangrango, telah ditetapkan 50 Taman Nasional dengan total luas $\pm 16,372$ juta hektar (Statistik Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 2014). Hampir seluruh kawasan yang ditetapkan sebagai Taman Nasional diawali dan masih menyisakan konflik berkepanjangan, baik yang bersifat vertikal (rakyat versus pemerintah) maupun yang bercorak horizontal (rakyat dengan rakyat).

Lokasi purnawirawan (Lokapurna) merupakan kawasan yang masuk dalam Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Kawasan Lokapurna sebelum diubah status menjadi kawasan taman nasional merupakan kawasan di bawah kewenangan Perhutani. Masyarakat yang tinggal di Lokapurna pada awalnya merupakan veteran Republik Indonesia (RI) yang meminjam lahan Lokapurna kepada Perhutani sebagai lahan pertanian dan peternakan. Awalnya kegiatan pertanian dan peternakan berjalan sesuai kesepakatan, namun menjelang periode 1990an terjadi penyimpangan penggunaan dan adanya oper alih garapan yang dilakukan oleh pemilik izin. Kawasan Lokapurna kemudian berkembang menjadi kawasan wisata setelah dibangun vila dan dibukanya objek wisata. Berkembangnya Lokapurna membuat semakin banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada kawasan Lokapurna.

Lokapurna menjadi bagian TNGHS setelah adanya Keputusan Menteri Kehutanan No. 175 tahun 2003 tentang perluasan TNGHS. Perluasan kawasan TNGHS ini dimaksudkan untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Gunung Halimun dan Gunung Salak untuk kepentingan kehidupan masyarakat sekitar. Konsekuensi dari perluasan taman nasional mengakibatkan hilangnya akses masyarakat untuk menggarap lahan di dalam kawasan taman nasional (Rahmawati *et al.* 2008). Akses yang dimiliki untuk pemanfaatan lahan oleh masyarakat Lokapurna menjadi terbatas dengan ditetapkannya Lokapurna menjadi bagian dari TNGHS dan hal ini menjadi konflik antara masyarakat dengan TNGHS.

Faktor penentu keberlanjutan pemanfaatan lahan terhadap Lokapurna penting diketahui untuk menguraikan konflik pemanfaatan lahan yang terjadi di Lokapurna antara masyarakat dengan TNGHS. Konflik terjadi akibat adanya perbedaan persepsi antara masyarakat dengan pihak TNGHS saat perluasan TNGHS. Pihak masyarakat merasa tidak dilibatkan saat perluasan kawasan oleh Taman Nasional sedangkan pihak Taman Nasional merasa tidak memiliki wewenang untuk melakukan kajian sebelum adanya SK Menteri Kehutanan No. 175 tahun 2003 (Prasasti 2013). Apabila konflik terus berlanjut maka dapat berakibat pada kerusakan kawasan karena pembangunan pemukiman ataupun perkembangan tempat wisata. Oleh karena itu perlu diketahui faktor penentu pemanfaatan lahan berbasis pembangunan berkelanjutan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Selain itu, faktor

penentu tersebut diperlukan untuk penyesuaian terhadap strategi yang akan diterapkan sehingga strategi yang diterapkan dapat berjalan optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Lokasi Purnawirawan (Lokapurna) Taman Nasional Gunung Halimun Salak Kabupaten Bogor Jawa Barat. Penelitian dilakukan dua tahap pada bulan Mei-Agustus 2014 dan Februari – Maret 2016. Penelitian tahap pertama dilakukan untuk mengetahui faktor penentu keberlanjutan dan strategi pemanfaatan lahan dan penelitian tahap kedua dilakukan untuk mengetahui kondisi hubungan antara masyarakat dengan pihak lain.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, kuesioner, alat perekam suara dan kamera. Objek penelitian adalah pegawai BTNGHS, masyarakat Lokapurna dan akademisi ahli dalam menangani permasalahan tenurial atau pernah terlibat di Lokapurna.

Metode penelitian ini yaitu metode kualitatif. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan di lapangan (observasi) dan kuisisioner tertutup. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dari dokumen – dokumen yang terkait di Lokapurna baik dari BTNGHS dan masyarakat Lokapurna.

Variabel yang diukur dalam faktor lingkungan yaitu kelestarian ekosistem, kelestarian jenis, kelestarian tata air, iklim mikro dan stabilitas tanah (UU No.5 tahun 1990; Permenhut No. 56 tahun 2006; Mackinnon *et al.* 1990; Soeriaatmadja 2000). Variabel yang diukur dalam faktor ekonomi yaitu ketersediaan modal, mata pencaharian, potensi wisata, permintaan pasar dan ketersediaan akses (Mackinnon *et al.* 1990; Panayotou 1991; Soeriaatmadja 2000). Variabel yang diukur dalam faktor sosial yaitu relasi sosial kekerabatan, kepemimpinan, keadilan, peran serta dan sejarah lahan (Mackinnon *et al.* 1990; Soeriaatmadja 2000). Dasar penentuan variabel – variabel tersebut menjadi faktor penentu berdasarkan hasil penelitian Prasasti (2013).

Data mengenai faktor penentu keberlanjutan dan strategi pemanfaatan lahan dilakukan dengan menggunakan kuesioner AHP. Pemilihan responden dalam penelitian dilakukan berdasarkan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan responden yang terlibat langsung atau dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti mengenai pemanfaatan lahan di Lokapurna. Responden penelitian dibagi ke dalam dua *kluster* yaitu responden pakar mengetahui faktor penentu keberlanjutan dan strategi pemanfaatan lahan yang berjumlah 18 orang dan responden yang berasal dari masyarakat untuk mengetahui kondisi hubungan antara masyarakat dengan pihak lain yang berjumlah 30 orang. Responden penelitian dilakukan terhadap para pakar yang terdiri atas pegawai BTNGHS, masyarakat, pengelola objek wisata, pemilik tempat usaha dan akademisi (Tabel 1).

Tabel 1 Rincian responden pakar

No	Kriteria Pakar	Jumlah (orang)
1.	Pegawai TNGHS	6
2.	Masyarakat	3
3.	Pengelola objek wisata	4
4.	Pemilik tempat usaha	3
5.	Akademisi (IPB)	2
	Jumlah	18

Data kondisi hubungan antara masyarakat dengan pihak lain diperoleh melalui pemberian kuesioner pola tertutup (*close ended*) kepada masyarakat untuk mengetahui interaksi masyarakat dengan pihak lain. Jumlah responden masyarakat berjumlah 30 orang yang berasal dari masyarakat yang tinggal di Lokapurna.

Penentuan faktor penentu pemanfaatan lahan di Lokapurna dilakukan menggunakan analisis hierarki proses. Saaty (1993) menjelaskan bahwa AHP merupakan sebuah model yang memberikan kemudahan bagi pemakainya untuk membangun gagasan-gagasan dan mendefinisikan persoalan dengan membuat asumsi masing-masing dan memperoleh pemecahan dari persoalan tersebut. Pengolahan data dilakukan menggunakan bantuan *software Expert Choice 2000*.

Analisis hubungan masyarakat dengan pihak lain dilakukan dengan analisis *gap*. Analisis *gap* dilakukan untuk menjelaskan hubungan antara masyarakat dengan

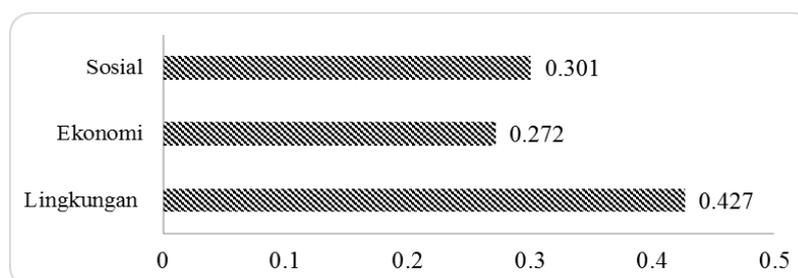
pihak lain saat ini dan kondisi yang diharapkan masyarakat dengan pihak lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Pemanfaatan Lahan di Lokapurna

Munasinghe (1993) menjelaskan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan memiliki tiga faktor penentu dalam pemanfaatan lahan yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi. Setiap faktor memiliki variabel masing-masing sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Faktor yang paling berpengaruh dalam pemanfaatan lahan di Lokapurna yaitu faktor lingkungan dengan nilai 0,427. Faktor sosial memiliki nilai 0,301 dan faktor ekonomi memiliki nilai 0,272. Nilai bobot faktor pemanfaatan lahan di Lokapurna disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1 Nilai faktor pemanfaatan lahan di Lokapurna

Faktor lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan menggambarkan daya dukung suatu kawasan dalam menyangga kehidupan manusia dan pembangunan (Napitupulu 2013). Faktor lingkungan yang dimaksud merupakan sumberdaya alam yang terdapat di Lokapurna seperti ekosistem hutan, air, iklim dan tanah. Sumberdaya alam merupakan modal alami (*natural capital*) dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang penting bagi pembangunan (Alikodra 2012) sehingga faktor lingkungan menjadi penting dan prioritas pertama dalam pemanfaatan lahan.

Faktor sosial menjadi prioritas kedua dalam pemanfaatan lahan di Lokapurna. Faktor sosial ini berkaitan erat dengan sejarah keberadaan kawasan Lokapurna. Kawasan Lokapurna pada awalnya merupakan kawasan yang dikelola oleh Perhutani.

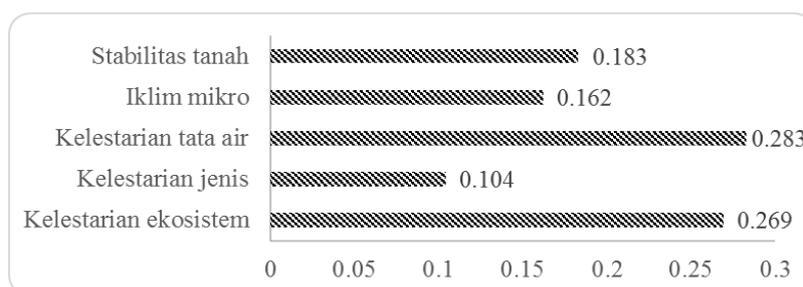
Kawasan Lokapurna kemudian dipinjam oleh veteran RI untuk digunakan sebagai areal pertanian dan peternakan. Seiring berjalannya waktu, banyak veteran yang menetap dan tidak sedikit juga pendatang yang menetap di Lokapurna. Kondisi ini lama kelamaan membuat fungsi kawasan berubah menjadi pemukiman seperti saat ini.

Faktor ekonomi menjadi prioritas ketiga dalam pemanfaatan lahan di Lokapurna. Faktor ekonomi di Lokapurna pada awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup para veteran dengan bertani dan beternak. Seiring perkembangan zaman dan kondisi masyarakat yang berubah maka cara masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi juga berubah. Banyaknya kawasan wisata di Lokapurna dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pendapatan di bidang jasa wisata. Banyak masyarakat yang menjadi

pedagang di sekitar objek wisata, penjaga karcis masuk dan juru parkir. Hal ini kemudian juga mengundang pendatang untuk membuka usaha penginapan.

a. Faktor lingkungan

Motivasi yang memengaruhi dalam pemanfaatan lahan di Lokapurna berdasarkan faktor lingkungan berturut-turut yaitu kelestarian tata air dengan nilai 0,283, kelestarian ekosistem dengan nilai 0,269, stabilitas tanah dengan nilai 0,183, iklim mikro dengan nilai 0,162 dan kelestarian jenis dengan nilai 0,104. Nilai motivasi pemanfaatan lahan berdasarkan faktor lingkungan disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2 Nilai motivasi pemanfaatan lahan berdasarkan faktor lingkungan

b. Faktor ekonomi

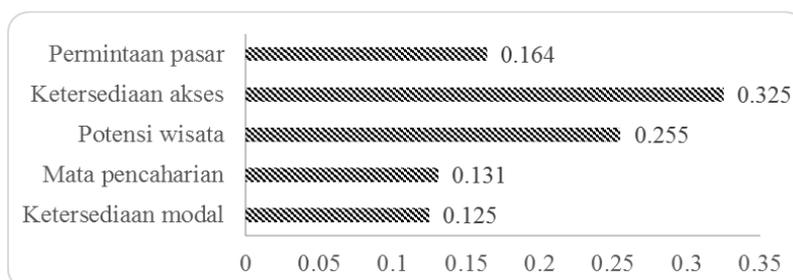
Nilai motivasi yang memengaruhi pemanfaatan lahan berdasarkan faktor ekonomi diurutkan dari nilai terbesar yaitu ketersediaan akses dengan nilai 0,325, potensi wisata dengan nilai 0,255, permintaan pasar dengan nilai 0,164, mata pencaharian dengan nilai 0,131, dan ketersediaan modal dengan nilai 0,125. Nilai motivasi pemanfaatan lahan berdasarkan faktor ekonomi disajikan pada Gambar 3.

Akses jalan menuju Lokapurna sudah beraspal dan dalam kondisi baik. Akses jalan yang baik memudahkan masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas seperti berjualan, bekerja maupun memenuhi kebutuhan hidupnya. Keberadaan akses jalan menuju Lokapurna juga membuka akses pembangunan agar kawasan

Air memiliki peran vital dalam kehidupan. Keberadaan air di Lokapurna mutlak diperlukan karena selain dimanfaatkan untuk dikonsumsi, air juga dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata berupa curug atau air terjun. Kawasan Lokapurna berada di dalam TNGHS yang merupakan ekosistem hutan. Hutan merupakan suatu ekosistem antara manusia, tumbuhan pembentuk hutan, satwaliar dan alam lingkungan memiliki keterkaitan yang erat (Suhendang 2002). Ekosistem hutan di Lokapurna yang baik akan membuat tata air, stabilitas tanah, iklim serta berbagai jenis tumbuhan dan satwaliar terjaga dengan baik.

Lokapurna lebih maju dan tidak terisolasi. Akses jalan yang ada di Lokapurna juga membuka potensi bagi masyarakat dari pengunjung yang akan melakukan aktivitas wisata di Lokapurna.

Keberadaan objek wisata di Lokapurna merupakan berkah tersendiri bagi masyarakat. Masyarakat memanfaatkan hal tersebut dengan melakukan aktivitas jasa wisata seperti berjualan, membuka penginapan dan mengelola objek wisata. Objek wisata di Lokapurna cukup dikenal baik oleh wisatawan baik dalam wisatawan dalam kota maupun luar kota. Kawasan wisata Lokapurna merupakan salah satu alternatif wisata yang ada di Kabupaten Bogor selain kawasan Puncak. Kondisi ini merupakan potensi bagi masyarakat Lokapurna untuk mengembangkan kawasan wisatanya.



Gambar 3 Nilai motivasi pemanfaatan lahan berdasarkan faktor ekonomi

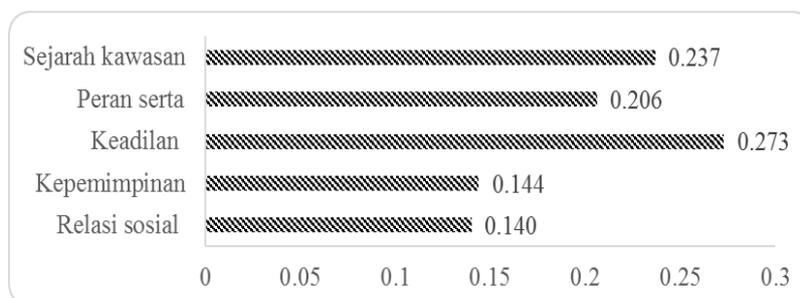
c. Faktor sosial

Nilai motivasi yang paling memengaruhi pemanfaatan lahan berdasarkan sosial yaitu keadilan dengan nilai 0,273, diikuti oleh sejarah kawasan dengan

nilai 0,237, peran serta 0,206, kepemimpinan 0,144, dan relasi sosial 0,140. Nilai motivasi pemanfaatan lahan berdasarkan faktor ekonomi disajikan pada Gambar 4.

Letak Lokapurna yang berada dalam kawasan TNGHS dapat menimbulkan ketidakadilan jika tidak dikelola dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Masyarakat menganggap konservasi justru menghambat pembangunan karena banyak aturan yang melarang kegiatan pembangunan. Keadilan yang dimaksud adalah memperjuangkan kesamaan, kesempatan, dan pengakuan untuk mendapatkan kebutuhan (Mitchell *et al.* 2007).

Sejarah kawasan menjadi prioritas kedua dalam faktor sosial. Pemanfaatan lahan di Lokapurna didasari oleh sejarah bahwa pada awalnya veteran meminjam lahan di Lokapurna untuk dijadikan areal pertanian dan peternakan. Hal ini kemudian berkembang hingga sekarang masyarakat memanfaatkan kawasan Lokapurna untuk pemukiman.



Gambar 4 Nilai motivasi pemanfaatan lahan berdasarkan faktor sosial

2. Alternatif Strategi Penggunaan Lahan Lokapurna

Pengembangan wisata secara kolaboratif (0,494) menjadi prioritas utama dalam alternatif strategi pemanfaatan lahan Lokapurna. Pengembangan wisata secara kolaboratif menjadi strategi yang paling mungkin dilakukan karena potensi yang dimiliki kawasan Lokapurna dapat dimanfaatkan secara optimal. Objek wisata yang ada di Lokapurna dapat dikolaborasi dengan masyarakat yang dapat dibina untuk mengelola objek wisata. Pemasukan hasil jasa wisata dapat digunakan untuk mengembangkan objek wisata dan kawasan Lokapurna.

Optimalisasi zona khusus (0,378) menjadi prioritas kedua dalam alternatif strategi pemanfaatan lahan Lokapurna. Kawasan Lokapurna masuk ke dalam zona khusus TNGHS. Zona khusus merupakan bagian dari taman nasional karena kondisi yang tidak dapat dihindarkan telah terdapat kelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional antara lain sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik (Permenhut No. 56 Tahun 2006). Optimalisasi zona khusus dimaksudkan untuk menjaga kawasan tetap terjaga sebagaimana kondisinya dan tidak merubah lansekap kawasan. Masyarakat Lokapurna tetap dapat mendiami tempatnya sekarang namun tidak dapat memanfaatkan alam untuk kebutuhan komersial hanya bisa untuk kebutuhan rumah tangga.

Relokasi masyarakat (0,124) menjadi prioritas terakhir dalam alternatif strategi pemanfaatan lahan Lokapurna. Relokasi masyarakat dilakukan untuk memindahkan masyarakat dari dalam kawasan Lokapurna ke lokasi baru yang berada di luar kawasan TNGHS. Sebelum melakukan relokasi, pihak TNGHS

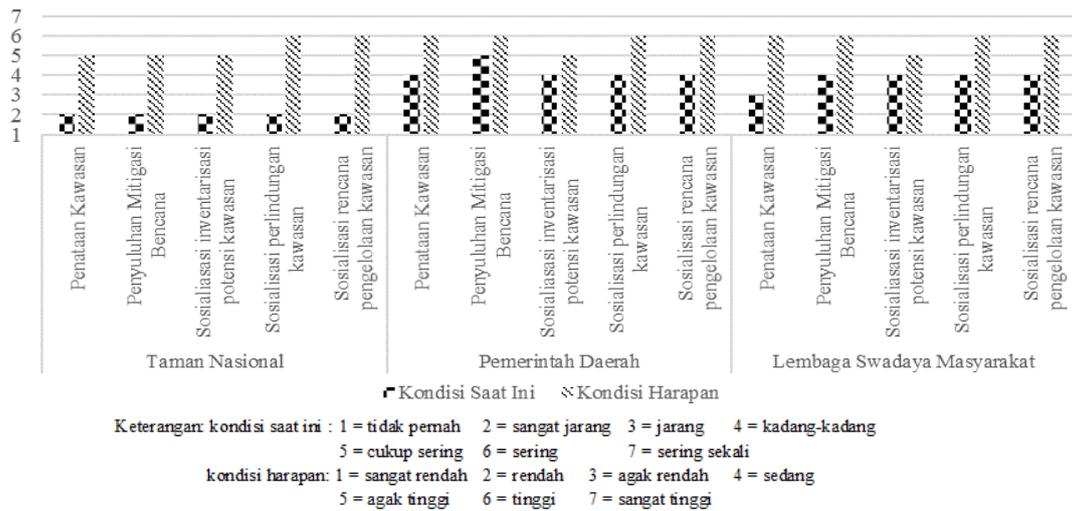
terlebih dulu melakukan inventarisasi lokasi baru yang akan ditempati masyarakat. Lokasi tersebut harus layak untuk ditinggali agar masyarakat yang pindah tidak kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru. Namun untuk melakukan relokasi ini memerlukan biaya yang tidak sedikit dan berpotensi mengundang konflik yang lebih besar.

3. Strategi Bagi Keberlanjutan Pemanfaatan Lahan di Lokapurna

Berdasarkan hasil AHP dari seluruh *stakeholder* diketahui bahwa strategi pengembangan wisata secara kolaboratif menjadi strategi dengan nilai terbesar dan menjadi prioritas pertama. Borrini-Feyerabend (2000) mengartikan konsep kolaborasi sebagai kondisi dimana adanya negosiasi antar aktor, saling menentukan dan menjamin pembagian fungsi-fungsi pengelolaan, berbagi hak dan tanggung jawab dari suatu wilayah atau sumber daya alam secara adil. Sebelum pengembangan wisata secara kolaboratif bersama masyarakat dilaksanakan, *stakeholder* perlu mengetahui kondisi aktual dan kondisi yang diharapkan dari kegiatan konservasi yang dilakukan. Dasar penentuan kegiatan konservasi berdasarkan PP No 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

a. Perlindungan

Kondisi kegiatan perlindungan yang dilakukan *stakeholder* saat ini masih rendah dari kondisi yang diharapkan. Masyarakat mengharapkan dukungan dari TN, Pemda dan LSM agar berperan aktif dalam perlindungan kawasan Lokapurna. Nilai perlindungan di Lokapurna disajikan pada Gambar 5.



Gambar 5 Nilai Persepsi pada Aspek Perlindungan di Lokapurna

Berdasarkan Gambar 5 kegiatan aspek perlindungan yang perlu menjadi perhatian bagi stakeholder yaitu:

1) Sosialisasi perlindungan kawasan

Perlindungan kawasan perlu dilakukan untuk menyangga kehidupan agar terpelihara proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Marsono 2004). Sosialisasi perlindungan kawasan penting dilakukan untuk menyamakan persepsi antar stakeholder agar dapat berkolaborasi melindungi kawasan Lokapurna. Tiga hal penting yang harus disepakati dalam perlindungan kawasan yaitu wilayah yang menjadi kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pola dasar pembinaan dan pengaturan cara pemanfaatan kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan (Marsono 2004).

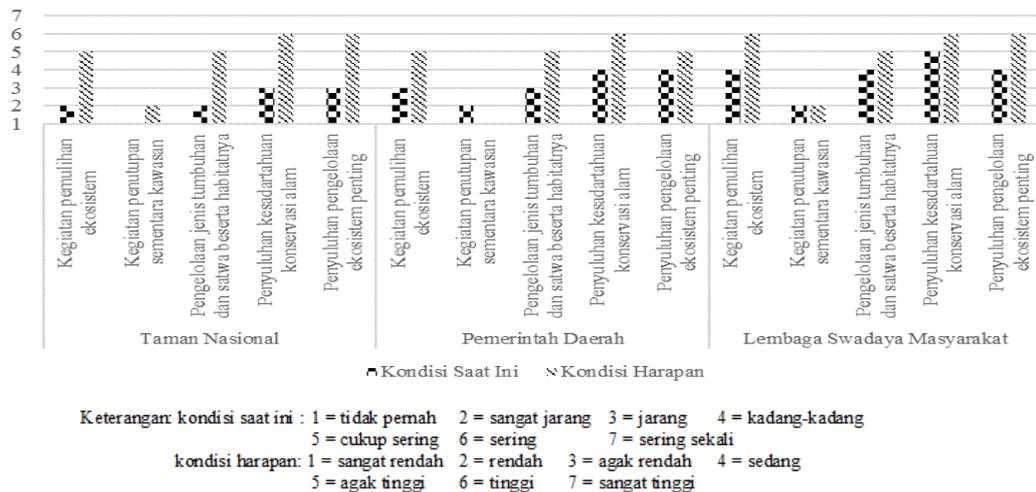
2) Sosialisasi rencana pengelolaan kawasan

Rencana pengelolaan kawasan bertujuan sebagai panduan kerangka kerja bagi pengelola kawasan dan

stakeholder untuk instrumen pencapaian kinerja bagi pengelolaan kawasan. Rencana pengelolaan kawasan disusun sebagai landasan bagi para stakeholder dalam menyusun program-program dan kegiatan pembangunan sesuai kewenangan, peran dan kepentingan masing-masing stakeholder. Sosialisasi rencana pengelolaan kawasan penting dilakukan agar terjadi kesepahaman diantara para stakeholder terhadap pengelolaan kawasan dan bertanggungjawab pada kewajiban masing-masing.

b. Pengawetan

Kondisi kegiatan pengawetan yang dilakukan stakeholder saat ini masih rendah dari kondisi yang diharapkan. Masyarakat mengharapkan dukungan dari TN, Pemda dan LSM agar berperan aktif dalam kegiatan pengawetan di kawasan Lokapurna. Nilai pengawetan di Lokapurna disajikan pada Gambar 6.



Gambar 6 Nilai Persepsi pada aspek pengawetan di Lokapurna

Berdasarkan Gambar 6 kegiatan aspek pengawetan yang menjadi perhatian bagi stakeholder yaitu:

1) Penyuluhan kesadartahuan konservasi alam

Konservasi adalah pengelolaan alam secara bijaksana bagi keperluan manusia sehingga memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi generasi saat ini dan menetapkan potensi untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi mendatang (Alikodra 2012). Penyuluhan kesadartahuan konservasi alam bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat akan pentingnya kegiatan konservasi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

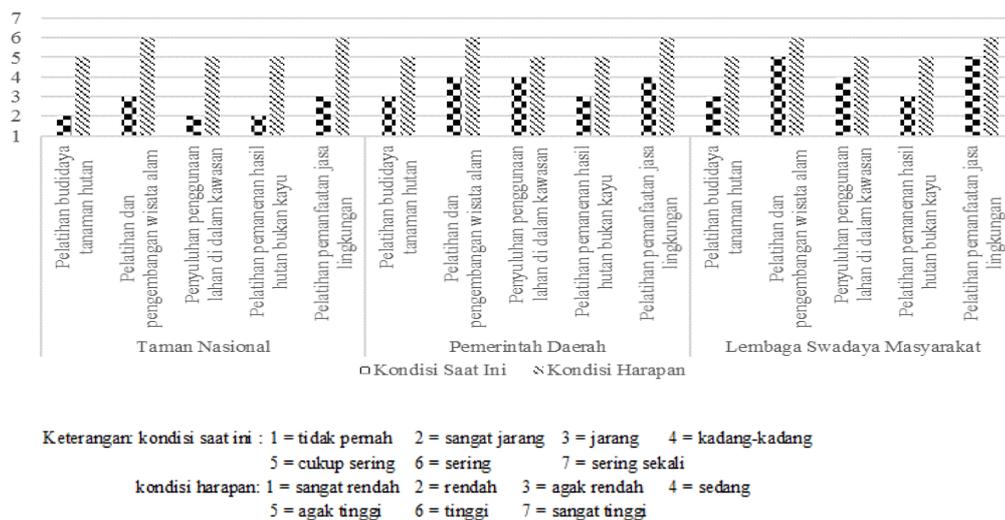
2) Penyuluhan pengelolaan ekosistem penting

Pengertian ekosistem berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 adalah hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati (tumbuhan dan satwa liar serta jasad renik) maupun nonhayati (tanah dan bebatuan, air, udara, iklim) yang

saling tergantung dan pengaruh-mempengaruhi dalam suatu persekutuan hidup. Penyuluhan pengelolaan ekosistem penting dilakukan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat akan pentingnya ekosistem dan lingkungan yang ditinggali untuk kelangsungan hidup masyarakat dan hubungan timbal balik antara manusia dengan alam. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keseimbangan alam dan pembangunan berkelanjutan.

c. Pemanfaatan

Kondisi kegiatan pemanfaatan yang dilakukan stakeholder saat ini masih rendah dari kondisi yang diharapkan. Masyarakat mengharapkan dukungan dari TN, Pemda dan LSM agar berperan aktif dalam kegiatan pemanfaatan kawasan Lokapurna. Nilai pemanfaatan di Lokapurna disajikan pada Gambar 7.



Gambar 7 Nilai Persepsi pada Aspek Pemanfaatan di Lokapurna

Berdasarkan Gambar 7 kegiatan aspek pemanfaatan yang menjadi perhatian bagi stakeholder yaitu:

1) Pelatihan dan pengembangan wisata alam

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara (Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010). Kegiatan wisata yang dilakukan di Lokapurna berbasis alam berupa curug, kolam pemandian air panas alam dan goa. Pelatihan pengembangan wisata alam bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan inovasi produk wisata.

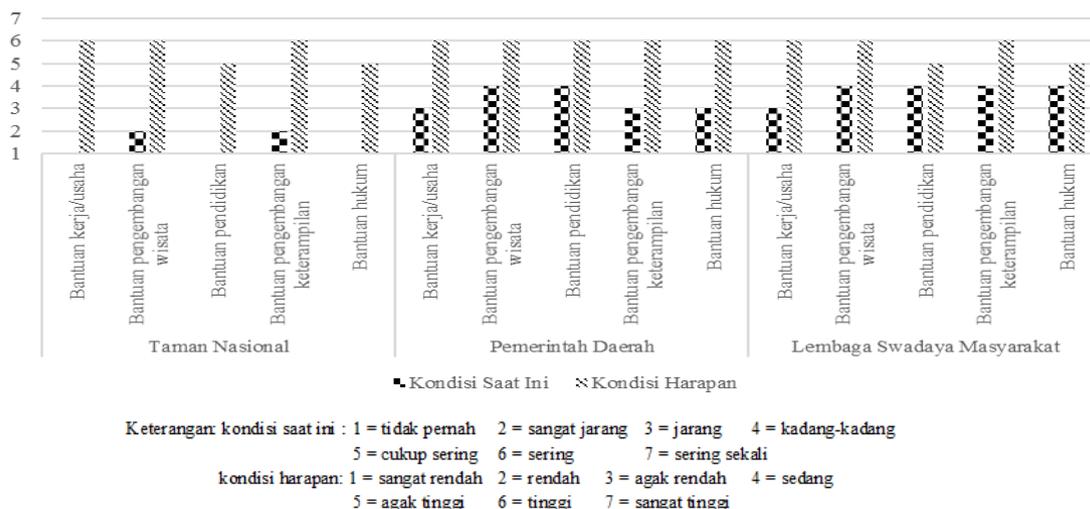
2) Pelatihan pemanfaatan jasa lingkungan

Jasa lingkungan merupakan jasa yang diberikan oleh fungsi ekosistem alam maupun buatan yang nilai dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung maupun

tidak langsung oleh penggunaannya untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan (Suprayitno 2008). Bentuk jasa lingkungan yang ada di Lokapurna berupa air, udara, pemandangan alam dan wisata alam. Masyarakat dilatih bagaimana cara memanfaatkan jasa lingkungan yang ada di Lokapurna secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa melupakan kelestarian alam.

d. Program bantuan sosial ekonomi bagi masyarakat

Kondisi kegiatan bantuan sosial ekonomi bagi masyarakat yang dilakukan stakeholder saat ini masih rendah dari kondisi yang diharapkan. Masyarakat mengharapkan dukungan dari TN, Pemda dan LSM agar berperan aktif dalam kegiatan bantuan sosial ekonomi bagi masyarakat Lokapurna. Nilai kegiatan bantuan sosial ekonomi di Lokapurna disajikan pada Gambar 8.



Gambar 8 Nilai persepsi pada kegiatan bantuan sosial ekonomi di Lokapurna

Berdasarkan Gambar 8 kegiatan bantuan sosial ekonomi yang menjadi perhatian bagi stakeholder yaitu:

1) Bantuan kerja/usaha

Ketertarikan masyarakat terhadap objek wisata yang ada di Lokapurna cukup tinggi terutama untuk pekerjaan. Masyarakat Lokapurna sebagian besar merupakan petani dan memiliki pekerjaan lain seperti pengelola wisata, penjaga vila, pedagang dan juru parkir (Rachmawati 2010). Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian bagi stakeholder dalam pengambilan kebijakan. Masyarakat Lokapurna harus menjadi bagian dari pertimbangan dalam pengambilan keputusan terutama yang berhubungan dengan kesejahteraan dan pengelolaan kawasan. Stakeholder memberi bantuan kerja atau usaha kepada masyarakat untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraannya. Cara yang dapat dilakukan dengan melalui pemberian modal investasi untuk mengembangkan objek wisata yang ada atau memperkerjakan masyarakat untuk membantu mengelola kawasan Lokapurna.

2) Bantuan hukum

Kondisi lahan di Lokapurna yang merupakan lahan sengketa dapat berimbas buruk pada keamanan kawasan. Masyarakat memerlukan bantuan hukum untuk menyelesaikan konflik lahan yang terjadi di Lokapurna. Stakeholder memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat dan memberikan pengertian agar masyarakat memahami dan menyadari konflik kawasan di Lokapurna. Bantuan hukum diperlukan untuk memberi kepastian hukum atas lahan yang saat ini dipermasalahkan.

SIMPULAN

1. Hasil AHP terhadap persepsi pakar menunjukkan bahwa faktor yang paling memengaruhi pemanfaatan lahan di Lokapurna adalah faktor lingkungan, diikuti

faktor sosial dan terendah yaitu faktor ekonomi. Variabel yang paling memengaruhi dalam faktor lingkungan yaitu kelestarian tata air dan kelestarian ekosistem. Pada faktor sosial, variabel yang paling memengaruhi adalah keadilan dan sejarah kawasan. Variabel yang paling berpengaruh pada faktor ekonomi adalah ketersediaan akses dan potensi wisata

2. Alternatif strategi pemanfaatan lahan di Lokapurna berdasarkan faktor-faktor penentu keberlanjutan pemanfaatan lahan adalah pengembangan wisata secara kolaboratif.

DAFTAR PUSTAKA

Alikodra HS. 2012. *Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan: Pendekatan Ecosophy bagi Penyelamatan Bumi*. Yogyakarta (ID): Gajah Mada University Press.

Borrini-Feyerabend G. 2000. *Co-management of Natural Resources: Organising, Negotiating and Learning by Doing*. Yaoundé (CM): IUCN.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan dan Konservasi Alam. 2014. *Buku Statistik Pengelolaan Hutan dan Konservasi Alam*. Jakarta (ID): Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

[IUCN] International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. 1994. *Guidelines for Protected Area Management Categories*. WCMC-IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge UK.

[Kepmen] Keputusan Menteri Kehutanan. 2003. Surat Keputusan Nomor 175 Tentang Penunjukan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas pada Kelompok Hutan Gunung Halimun Dan Kelompok

- Hutan Gunung Salak Seluas ± 113.357 Hektar di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten Menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. Jakarta (ID): Departemen Kehutanan Republik Indonesia.
- MacKinnon K, MacKinnon J, Graham Child, dan Jim Thorsell. 1990. *Pengelolaan Kawasan yang Dilindungi di Daerah Tropika*. Yogyakarta (ID): Gajah Mada University Press.
- Marsono D. 2004. *Konservasi Sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta (ID): BIGRAF Publishing dan Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan.
- Mitchell B, Setiawan B, Rahmi DH. 2007. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta (ID): Gajah Mada University Press.
- Munasinghe M. 1993. *Environmental Economics and Sustainable Development*. Washington (AS): The World Bank.
- Napitupulu A. 2013. *Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan: suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Bogor (ID): PT. IPB Press.
- Panayotou T. 1991. *Economy and Ecology in Sustainable Development*. Di dalam: SPES [The Society for Political and Economic Studies], editor. *Economy and Ecology in Sustainable Development*; Mei 1991; Jakarta, Indonesia. Jakarta (ID): Gramedia Pustaka Utama.
- [Permenhut] Peraturan Menteri Kehutanan. 2006. *Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 56 Tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional*. Jakarta (ID): Departemen Kehutanan Republik Indonesia.
- [PP] Peraturan Pemerintah. 2011. *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*. Jakarta (ID): Pemerintah Pusat Republik Indonesia.
- [PP] Peraturan Pemerintah. 2015. *Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*. Jakarta (ID): Pemerintah Pusat Republik Indonesia.
- Prasasti BG. 2013. *Strategi penyelesaian konflik penguasaan lahan di Lokapurna Taman Nasional Gunung Halimun Salak [Skripsi]*. Bogor (ID): Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
- Rachmawati E. 2010. *Sistem sosial pengembangan wisata alam di kawasan Gunung Salak Endah [Tesis]*. Bogor (ID): Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Rahmawati R, Subair, Idris, Gentini, Ekowati D, Setiawan U. 2008. *Pengetahuan lokal masyarakat adat kasepuhan: adaptasi, konflik dan dinamika sosio-ekologis*. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*. 2(2): 151-190.
- Saaty TL. 1993. *Proses Hierarki Analitik Untuk Pengambilan Keputusan Dalam Situasi Yang Kompleks*. Jakarta (ID): PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Soeriaatmadja RE. 2000. *Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan*. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Suhendang E. 2002. *Pengantar Ilmu Kehutanan*. Bogor (ID): Yayasan Penerbit Fakultas Kehutanan (YPFK).
- Suprayitno. 2008. *Teknik Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam*. Bogor (ID): Pusdiklat Kehutanan.
- [UU] Undang-undang. 1990. *Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Jakarta (ID): Pemerintah Pusat Republik Indonesia.
- [UU] Undang-undang. 2010. *Undang - undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kepariwisata*. Jakarta (ID): Pemerintah Pusat Republik Indonesia.